

**PENGARUH SASARAN ANGGARAN, PENERAPAN STANDAR  
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH PADA DINAS  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
SUMUT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**OLEH :**

**NAMA : ARIFIN TAMPUBOLON**  
**NPM : 1805170202**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 17 Oktober 2024, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

#### MEMUTUSKAN

Nama : **ARIFIN TAMPUBOLON**  
N P M : **1805170202**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Konsentrasi : **AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**  
Judul Skripsi : **PENGARUH SASARAN ANGGARAN, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMUT**

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

#### TIM-PENGUJI

Penguji I



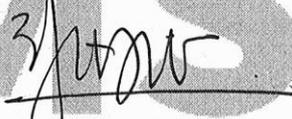
(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

Penguji II



(REZKI ZURRIAH, S.E., M.Si)

Pembimbing



(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., AK., CA)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

#### PANITIA UJIAN

Ketua



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ARIFIN TAMPUBOLON

NPM : 1805170202

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMUT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2024

Pembimbing Skripsi



(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK., CA)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



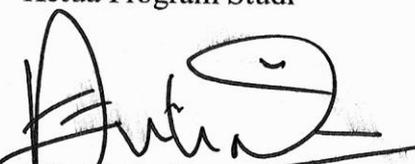
(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.)

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

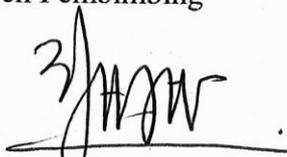
**Nama Lengkap** : ARIFIN TAMPUBOLON  
**N.P.M** : 1805170202  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
**Nama Dosen Pembimbing** : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK., CA  
**Judul Penelitian** : PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMUT

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	—		
Bab II	—		
Bab III	perbaiki tabel anda data seri yg di pilih. yg valid dan diambil belu atau hore.	12/9/24	3/f
Bab IV	deskrpsi data response dan variabel belu atau pembatasan manik belu.	12/9/24	2/f
Bab V	perbaiki kerangka 2 smm smm hore panel	12/9/24	3/f
Daftar Pustaka	mendeley	12/9/24	3/f
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

  
(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

Medan, Agustus 2024  
Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing



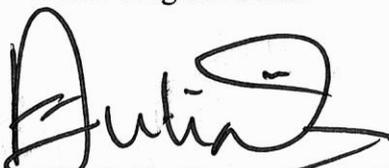
(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK., CA)

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Lengkap** : ARIFIN TAMPUBOLON  
**N.P.M** : 1805170202  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
**Nama Dosen Pembimbing** : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK., CA  
**Judul Penelitian** : PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMUT

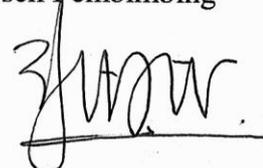
Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	---		
Bab II	---		
Bab III	tabel, variabel di satukan saya spes. pulvis	26/9 24	3/
Bab IV	deskrpsi data di variabel kapan pembahasan lebih di pengu.	26/9 24	3/
Bab V	kesimpulan pedoman saya hari lebih pengu.	26/9 24	3/
Daftar Pustaka	daftar' artikel jurnal dosen.	26/9 24	3/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	---		

Diketahui oleh:  
 Ketua Program Studi



(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

Medan, Agustus 2024  
 Disetujui Oleh :  
 Dosen Pembimbing



(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK., CA)

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

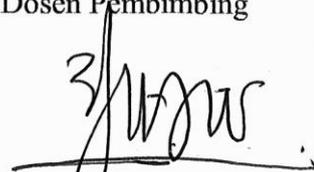
**Nama Lengkap** : ARIFIN TAMPUBOLON  
**N.P.M** : 1805170202  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
**Nama Dosen Pembimbing** : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK., CA  
**Judul Penelitian** : PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMUT

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	peubahan font / huruf TKR 12		
Bab II	—		
Bab III	uji validitas nilai di salah satu asumsi kelasik masalah ke Regresi Linier Bergant	05/10/24	3/
Bab IV	- gambar umum tabel informasi - grafik barisan di setiap deskripsi data	05/10/24	3/
Bab V	- pembahasan ke tabel di setiap. - kesimpulan perbaiki.	5/10/24	3/
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace rangkai ke sidang	9/10/24	3/

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

  
(Assoc.Prof) Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.

Medan, Agustus 2024  
Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing



(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin Tampubolon  
NPM : 1805170202  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumut

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Arifin Tampubolon

## **ABSTRAK**

Akuntabilitas di pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konsep pemerintahan yang baik akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, maka nilai akuntabilitas sangatlah penting diadopsi dalam mengelola pemerintahan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu 58 pegawai keuangan yang berada di ruang lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan software SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun variabel yang paling mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan. Besarnya pengaruh Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut adalah sebesar 36,1%

**Kata Kunci : Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

## **ABSTRACT**

*Accountability in government is very important in the delivery of public services. The phenomenon that occurs in the development of the public sector in Indonesia today is the strengthening demand for accountability for public institutions, both at the central and regional levels. In the concept of good governance, accountability is one of the basic principles that must be implemented so that government administration can run well and correctly. Therefore, it is very important to adopt the value of accountability in managing government. The aim of this research is to determine the influence of Budget Targets, Implementation of Public Sector Accounting Standards and Monitoring the Quality of Financial Reports on the Performance Accountability of Government Agencies at the North Sumatra Maritime and Fisheries Service. The sample in this study was 58 financial employees within the scope of the North Sumatra Maritime Affairs and Fisheries Service. The data analysis technique in this research uses multiple linear regression analysis with SPSS 23 software. The results of the research show that Budget Targets influence the Performance Accountability of Government Agencies, the Implementation of Public Sector Accounting Standards influences the Performance Accountability of Government Agencies, Monitoring the Quality of Financial Reports influences the Performance Accountability of Agencies Government. The variable that most influences the Performance Accountability of Government Agencies is Supervision of the Quality of Financial Reports. The magnitude of the influence of Budget Targets, Implementation of Public Sector Accounting Standards and Supervision of the Quality of Financial Reports on the Performance Accountability of Government Agencies at the North Sumatra Maritime and Fisheries Service is 36.1%*

***Keywords: Budget Targets, Implementation of Public Sector Accounting Standards, Monitoring the Quality of Financial Reports and Accountability for the Performance of Government Agencies***

## KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut”**. Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua darizaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari orang tua peneliti, Ayahanda tercinta **Nurrahim Tampubolon** dan Ibunda **Gunarti Saragih** yang telah berjasa dalam segala hal. serta dari berbagai pihak peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi danBisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil I FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak** selaku Sekretaris Program Studi

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

7. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., AK., CA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Manajemen atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
9. Seluruh Staf/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
10. Nurrahim Tampubolon dan Gunarti Saragih selaku kedua orangtua yang telah memberikan dukungan dan motivasi penuh untuk penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi dan dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Medan, Oktober 2024

**Arifin Tampubolon**

1805170202

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	13
1.3 Perumusan Masalah .....	13
1.4 Tujuan Penelitian .....	14
1.5 Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
2.1.1.2 Tujuan Akuntabilitas Kinerja.....	18
2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja.....	18
2.1.1.4 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	19
2.1.2 Sasaran Anggaran.....	22
2.1.2.1 Pengertian Sasaran Anggaran .....	22
2.1.2.2 Manfaat Sasaran Anggaran .....	22
2.1.2.3 Indikator Sasaran Anggaran .....	23
2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik .....	24
2.1.3.1 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik.....	24
2.1.3.2 Tujuan Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik .....	25
2.1.3.3 Elemen-Elemen Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik.....	26
2.1.4 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan .....	29
2.1.4.1. Pengertian Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan.....	29
2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.....	30
2.1.4.3 Indikator Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan.....	31
2.2 Kerangka Konseptual .....	33
2.3 Hipotesis Penelitian.....	37

<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	38
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Uji Instumen Penelitian.....	43
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	51
4.2 Pembahasan.....	69
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.....	8
Tabel 3.1	Definisi Operasional .....	39
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian.....	40
Tabel 3.3	Sampel Penelitian.....	42
Tabel 3.4	Hasil Uji Validitas.....	43
Tabel 3.5	Hasil Uji Reliabilitas .....	45
Tabel 4.1	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usia .....	52
Tabel 4.2	Karakteristik Responden berdasarkan Kelamin.....	52
Tabel 4.3	Deskripsi Data Variabel Sasaran Anggaran.....	53
Tabel 4.4	Deskripsi Data Variabel Standar Akuntansi Sektor Publik .....	54
Tabel 4.5	Deskripsi Data Variabel Kualitas Laporan Keuangan .....	57
Tabel 4.6	Deskripsi Data Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	59
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi Linearv Berganda .....	61
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas .....	63
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel 4.10	Hasil Uji Autokorelasi .....	66
Tabel 4.11	Hasil Uji t .....	66
Tabel 4.12	Hasil Uji F.....	68
Tabel 4.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t .....	48
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F .....	49
Gambar 4.1 Hasil Grafik <i>Scatterplot</i> .....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner.....	76
Lampiran 2. Data Tabulasi Responden .....	79
Lampiran 3. Hasil Output SPSS.....	81

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014: 2). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks di bandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik di tujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta.

Haryanto, dkk. (2017:1) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian

kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Akuntabilitas di pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konsep pemerintahan yang baik akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, maka nilai akuntabilitas sangatlah penting diadopsi dalam mengelola pemerintahan.

Akuntansi Sektor Publik sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan (Biduri, 2018). Akuntansi Sektor Publik memiliki peranan yaitu memberikan informasi yang dapat berguna bagi manager sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggung-jawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya, serta melaporkan kegiatan-kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan serta penggunaan anggaran publik atau disebut Akuntabilitas (Accountability) dan juga dapat memberikan informasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu entitas atau organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis atas operasi serta penggunaan dari sumber daya yang dianggarkan dalam entitas atau organisasi, (Pamungkas, 2012).

Entitas atau organisasi pemerintah sebagaimana entitas atau organisasi publik pada umumnya, akan beraktivitas berdasarkan anggaran. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut Sartika (2019) anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

Akuntabilitas atau (Accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai “pertanggungjawaban”. Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Pasal (1) ayat (14) Akuntabilitas Kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara periodik. Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas, Instansi Pemerintah juga mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini didasarkan pada argumen, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua tindakan

atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebuah pelaksanaan pemerintahan yang bersih menuntut seluruh pemerintah bekerja secara profesional dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas kepada publik. Yang membuat ketidakpuasan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari pelayanan instansi pemerintah memicu timbulnya tuntutan yang tinggi terhadap pertanggungjawaban pemerintah. Tuntutan yang semakin tinggi tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara yang diamanatkan kepada mereka. Kinerja pemerintah menjadi sorotan publik karena masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah itu sendiri karena semakin banyaknya instansi pemerintah yang terlihat tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih baik.

Kinerja pemerintah didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan mengintegrasikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintah yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari

publik. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah telah dilakukan setelah dikeluarkannya Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instruksi ini menugaskan kepada para pemimpin instansi pemerintah untuk merumuskan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masing-masing instansi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Menguatnya kasus kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk mencapai sasaran dan tujuan sehingga dapat menciptakan *good governance*. Instansi pemerintah yang sehat dapat mencerminkan kepentingan dan pengharapan kepada masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dengan efisien dan efektif.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian dari isu kebijakan strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good government*.

Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2017). Di bidang ekonomi perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan di bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah dibutuhkan transparansi terhadap masyarakat agar tidak memunculkan dampak negatif yaitu adanya ketidakadilan masyarakat, penyalahgunaan wewenang, menimbulkan kekacauan dalam alokasi sumber daya, dan memperbanyak kasus korupsi (Adha, 2016).

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah (Andaliza, 2007) Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. .

Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang

dicapainya. kemudian, pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen LAKIP. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak di susun dan di sampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan setahun sekali. Penyusunan LAKIP harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktivitas di lingkungan instansi pemerintah mengingat LAKIP merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah, LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik. LAKIP tersebut harus disampaikan selambat- selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Nordawan dan Ayuningtyas; 2011).

Kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut sering kali tidak selaras dengan rencana yang ditetapkan pemerintah daerah. Akibatnya, sejumlah sasaran pembangunan tidak tercapai. Kondisi tersebut merupakan salah satu materi yang nantinya akan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut kepada Pemerintah RI. Laporan tersebut dibuat oleh setiap kepala SKPD yang akan dikoordinasikan dengan Kabag Organisasi Sekretariat Daerah. Laporan tersebut bertujuan untuk memberikan penilaian dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dalam praktiknya, kinerja mereka banyak yang tidak mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyerahan LAKIP tersebut berdasarkan Permen PAN No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/AKIP. Pembuatan LAKIP berguna

sebagai bahan evaluasi bagi pegawai di sejumlah instansi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Dengan laporan itu, diharapkan para pegawai negeri tersebut dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab instansi.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**(LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
						Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2022	
1	Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan	a. Jumlah Pendapatan Nelayan ... Rp/org/th	1 Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah Pendapatan Nelayan	37.400.00	36.000.000	32.000.000	37.400.00	33.200.000	
				Jumlah pendapatan pembudidaya ikan	47.000.000	43.000.000	39.000.000	47.000.000	44.300.000	
		b. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan ... Rp/org/th	2 Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kealutan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	1. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	54	52	50	54	52	
				3 Meningkatkan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Nilai Ekspor Hasil Perikanan	150,73	156,230	144,119	150,73	133,29
					2 Konsumsi Ikan	38,00	36,63	32,13	38,00	37,16
2	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	4 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	BB	B	A	B	
				Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	-	>95	>85	-		

Berdasarkan data di atas perlunya membenahan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut untuk meningkatkan kualitas atau pertanggungjawaban kinerjanya. Dalam berita ini tingkat akuntabilitas sebagian besar pemerintah daerah masih rendah, karena menurut menteri PAN-RB Asman Abdul untuk

menciptakan akuntabilitas kinerja disuatu instansi harus memiliki tata kelola yang baik serta berorientasi hasil.

Anggaran merupakan suatu aspek terpenting dalam menyusun rencana dan misi secara sistematis pada periode yang sudah ditentukan. Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu kinerja manajerial. Sasaran anggaran tersebut akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan instansi pemerintah. Sasaran anggaran tersebut dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara transparan.

Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintahan terutama dalam akuntabilitasnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, menurut Mardiasmo (2018) anggaran merupakan dokumen antara pemerintah dan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang. Menurut Kenis (1979) terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah anggaran. Goal Setting Theory menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang jelas dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja, semakin jelas sasaran anggarannya maka akuntabilitas kinerjanya akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Zakiyudin (2015), dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan.

Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk mensejahterakan rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dalam pemerintahan (Hasanah dkk, 2017). Namun pada penelitian Kaltsum dan Rohman (2014) menyatakan bahwa sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Termasuk pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah sejak lama, yaitu manual administrasi keuangan yang sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan secara sempurna. Sehingga diperlukan sebuah sistem pelaporan yang baik agar laporan keuangan dapat dihasilkan dan diterima oleh masyarakat serta pihak yang berkepentingan dengan menggunakan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang didasarkan pada Standart Akuntansi Pemerintahan.

Dalam amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam Bab 1 ayat 2 disebutkan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga Standart Akuntansi Pemerintahan menjadi tolak ukur dijadikan pedoman pada setiap laporan akuntansi yang disajikan untuk mengetahui informasi mengenai posisi laporan

keuangan, realisasi anggaran, arus kas serta kinerja keuangan yang berguna dan bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Penerapan standart akuntansi pemerintah yang baik akan membawa sebuah akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Selain itu akan membantu pemerintah daerah atau pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam periode tertentu, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jujur berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Pamungkas (2012) bahwa dimana apabila kedua faktor itu diterapkan dengan baik sesuai dengan perundang - undangan maka hasil yang akan dicapai akan maksimal. Dengan demikian pelaporan keuangan dapat dengan mudah untuk diadakan pengawasan dan audit dari instansi/lembaga pemerintah yang berwenang atau dari pihak internal melalui Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan BPKP serta pihak eksternal oleh BPK. Namun pada penelitian Noramnsyah dan Sikomba (2022) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi sector public tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari suatu rencana yang teratur dengan baik untuk mencatat transaksi keuangan serta memastikan kendalanya, mengamankan dan mengendalikan aset negara. Adanya pengendalian akuntansi dapat memperkirakan masa depan atau kemungkinan - kemungkinan yang terjadi dari aktivitas organisasi. Sistem akuntansi yang baik dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintahan saat ini, Aparatur Sipil

Negara (ASN) merupakan salah satu aset atau Sumber Daya Manusia (SDM) negara yang sangat penting dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan utusan pemerintah yang bertugas melayani kepentingan publik sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan yang profesional serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawasan internal pemerintah sangat diperlukan sebagai antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal dan akan berimplikasi. Dengan ketiadaan standart akuntansi pemerintah bukan berarti penyusunan laporan keuangan tidak dapat disusun, melainkan ketentuan yang ada mengharuskan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam bentuk neraca, laporan arus kas, laporan perhitungan realisasi anggaran dan nota perhitungan (Hasanah, 2017). Penelitian yang dilakukan Anggita dkk (2023) menyatakan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang dibahas berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja.
2. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas.
3. Adanya keterbatasan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Sejalan dengan itu, baik penerapan akuntansi sektor publik dan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan kendala yang ada harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat agar, kedepannya tercipta akuntabilitas kinerja yang baik.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut?
3. Apakah Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut?

4. Apakah Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan berfikir, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman meneliti tentang Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah, Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan tugas otonomi daerah khususnya sebagai pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan informasi dalam mengambil kebijakan penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan, yang nantinya berhubungan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitasnya.

### 3. Bagi Akademis

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2020) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Adisasmita (2011) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan: “perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.” sedangkan, menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah “kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Mahmudi dalam Asmawanti dkk (2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu usaha pertanggungjawaban baik secara personal maupun lembaga/instansi pemerintah terhadap wewenang administrasi yang diberikan

kepadanya. Akuntabilitas kinerja itu sendiri menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan, menurut Ziman dan Muhammad dalam Asmawanti dkk (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya baik itu berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target dan tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta misi organisasi (Reyhan, 2017)

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban pemerintah kepada masyarakat

secara periodik untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan menyampaikan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

#### **2.1.1.2 Tujuan Akuntabilitas Kinerja**

Menurut Toman (2016:10) tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah: “Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasaran SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional; terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah”.

#### **2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja, yaitu :

- a. Penerapan good governance (Kusuma 2014).

Good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja guna meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, diperlukan juga suatu landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja.

- b. Sasaran Anggaran

Sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, karena dengan sasaran anggaran yang jelas maka tujuan anggaran yang ditetapkan dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut, sehingga dapat meningkatkan

akuntabilitas kinerja.

c. Pengendalian intern (Rahman and Rachman 2021).

Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, karena pengendalian intern merupakan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data keuangan.

d. Partisipasi anggaran (Subroto, 2014)

Partisipasi anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja dengan adanya partisipasi pegawai dalam melakukan penyusunan anggaran diharapkan masyarakat dapat mengungkapkan aspirasinya atau keinginannya sehingga mewujudkan akuntabilitas kinerja yang maksimal

#### **2.1.1.4 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat empat aspek yang diukur dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi bahkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, akuntabilitas hukum menjamin ditegakannya supremasi hukum.

2. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik semestinya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

### 3. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

### 4. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan program-program organisasi yang diciptakan dengan mutu tinggi dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga saat pelaksanaan program.

Menurut Moeheriono (2014:104) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam prosesnya mencakup sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik.
2. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan sasaran dan strategi instansi pemerintah.
3. Merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah.
4. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh dengan seksama.
5. Mengatur pencapaian kinerja instansi pemerintah.
6. Melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan bahwa indikator evaluasi SAKIP diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Pemenuhan Renstra;
- b. Kualitas Renstra;
- c. Implementasi Renstra.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Pemenuhan Pengukuran;
- b. Kualitas Pengukuran;
- c. Implementasi Pengukuran.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Pemenuhan Pelaporan;
- b. Kualitas Pelaporan;
- c. Pemanfaatan Pelaporan.

4. Evaluasi Internal

- a. Pemenuhan Evaluasi;
- b. Kualitas Evaluasi;
- c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi.

5. Capaian Kinerja

- a. Kinerja yang dilaporkan (Output);
- b. Kinerja yang dilaporkan (Outcome);
- c. Kinerja tahun berjalan (Benchmark)

## **2.1.2 Sasaran Anggaran**

### **2.1.2.1 Pengertian Sasaran Anggaran**

Menurut Kenis 1979 dalam Moehariono (2014) dalam sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya.

Locke dan Latham 1984 dalam Moehariono (2014) berpendapat bahwa sasaran anggaran yang spesifik akan lebih produktif bila dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, karena hal tersebut dapat menyebabkan para pegawai merasa kebingungan, tertekan, dan merasa tidak puas. Sasaran anggaran akan lebih memudahkan OPD untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran anggaran adalah seberapa jauh tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik yang bertujuan agar anggaran tersebut dapat dijadikan tolak ukur dan mudah dipahami oleh OPD untuk menyusun rencana kegiatan sesuai keinginan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.

### **2.1.2.2 Manfaat Sasaran Anggaran**

Menurut Locke dan Latham (1984) manfaat sasaran anggaran adalah:

1. Menghilangkan kejenuhan.
2. Meningkatnya produktivitas dan perbaikan kualitas kerja. Sasaran anggaran akan memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas

kerja.

3. Meningkatkan kepuasan terhadap hasil yang dicapai.
4. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa bangga jika sasaran tercapai dan akan menerima tantangan lebih lanjut.
5. Membangkitkan rasa mampu dalam berkerja sehingga dapat meningkatkan kinerja. Sasaran yang jelas akan mampu membangkitkan motivasi kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja para pekerja.
6. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa bangga apabila sasaran tercapai dan akan menerima tantangan lebih lanjut.
7. Mempengaruhi tingkat persaingan pekerja secara spontan yang mana lebih lanjut akan meningkatkan kinerja mereka. Setiap pekerja akan termotivasi untuk bersaing secara sportif untuk bekerja sebab mereka dapat memahami arah perusahaan dengan mengetahui sasaran yang jelas.

### **2.1.2.3 Indikator Sasaran Anggaran**

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran anggaran menurut Kenis 1979 dalam Moeheriono (2014) adalah:

1. Spesifik yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.
2. Mengerti yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti serta menjadi prioritas utama.
3. Jelas yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara

jelas serta tidak bermakna ganda. Tiga indikator di atas akan digunakan dalam pengukuran sasaran anggaran menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Ashari (2020).

### **2.1.3. Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik**

#### **2.1.3.1 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik**

Istilah Sektor Publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan sektor swasta. Keduanya menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapai tujuannya dan memiliki kemiripan dalam proses pengendalian. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.

Menurut Bastian (2014) mendefinisikan “Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) mendefinisikan “Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen

maupun alat informasi bagi publik”. Halim (2014) mendefinisikan bahwa “Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.

Menurut Mardiasmo (2018), Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip - prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik, alat informasi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

### **2.1.3.2 Tujuan Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik**

Tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik menurut Bastian (2014) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan kepada pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan

otonomi daerah yang baru.

2. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan.

### **2.1.3.3 Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik**

Bastian (2014: 12) menjelaskan bahwa elemen-elemen akuntansi sektor publik memiliki rangkaian siklus, antara lain :

1. Perencanaan Publik

Dalam bagian ini, hal-hal pokok yang wajib diketahui adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta berterimanya arah dan tujuan organisasi. Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

2. Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan

dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara. Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

### 3. Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses - proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas pengeluaran.

### 4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat

### 5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi

yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

#### 6. Audit Sektor Publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah memposisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), instansi pengelola aset negara lainnya, ataupun organisasi publik nonpemerintah, seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini.

#### 7. Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku

## **2.1.4 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan**

### **2.1.4.1 Pengertian Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dalam akuntansi sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas. Laporan keuangan merupakan penyajian yang sistematis tentang posisi keuangan dan kinerja suatu entitas, informasi akuntansi yang terutama ditujukan kepada pihak eksteren suatu perusahaan atau organisasi disebut Laporan Keuangan (Mardiasmo, 2018).

Laporan keuangan merupakan laporan hasil (output) sedangkan masukannya (input) berupa transaksi bisnis. Supaya masuk ke dalam sistem pencatatan, maka keseluruhan input harus dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi (Toto Prihadi, 2013).

Laporan keuangan yang tepat telah menjadi komponen kunci dimana akuntabilitas diharapkan dan dapat ditunjukkan. Penilaian kinerja organisasi dapat dilakukan oleh stakeholder Melalui laporan keuangan. Laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015:1) laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Sedangkan Kieso, dkk (2007:2) menuliskan mengenai pengertian laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak - pihak yang berkepentingan baik berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas.

Mardiasmo (2018:30). Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015:2) adalah laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Mardiasmo (2018:31) laporan keuangan merupakan laporan terorganisir yang merinci situasi dan transaksi keuangan entitas pelapor. Catatan keuangan entitas sektor publik memainkan peran penting dalam membangun akuntabilitas sektor publik. Tuntutan penerapan akuntabilitas publik yang semakin meningkat berdampak pada kemampuan manajemen sektor publik dalam menyampaikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (SAP, 2010:25).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan yaitu Relevan, Handal, Sebanding, dan Dapat Dimengerti. Menurut Hery (2017:3), laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau perusahaan kegiatan kepada pihak yang berkepentingan.

#### **2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan**

Faktor yang mempengaruhi suatu kualitas laporan keuangan yang pertama adalah penerapan standar akuntansi pemerintah. Di Indonesia pada tahun 2010,

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sebagaimana implementasi atas terselenggaranya pelaporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan perangkat yang berupa standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi yang mendukung pelaksanaan standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **2.1.4.3 Indikator Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang berkualitas sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011), adalah:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di

masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat koreksi di masa lalu.
  - b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
2. Keandalan - keandalan Informasi harus andal (reliable), informasi memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
3. Dapat Dibandingkan
- Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan

antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antara entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antara periode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

#### 4. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

## **2.2 Kerangka Konseptual**

### **2.2.1 Pengaruh Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Menurut Kenis (1979), sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Maka dari itu, sasaran anggaran wajib dinyatakan secara spesifik, jelas, dan mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran. Apabila sasaran anggaran dinyatakan jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat.

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang

diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Menurut Kenis (1979) dalam Munawar (2006) sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. 40 Ketidakjelasan sasaran anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi (Suhartono dan Mochammad, 2006). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kinasih (2018) yang membuktikan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, sesuai teori dan didukung oleh hasil beberapa penelitian terdahulu oleh Silalahi (2017), Cantika (2018), dan Gibor (2021) yang menyatakan bahwa sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **2.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Dalam teori entitas dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi (Suwardjono, 2005). Akuntansi sektor publik sering disebut Akuntansi Pemerintah, Akuntansi pemerintah itu

sendiri adalah aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas info keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan (Bachtiar Arif, 2009).

Dalam penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat berpengaruh baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan objek pengeluaran.

Penelitian Santoso & Pambelum (2008), telah menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil ini juga didukung oleh penelitian Pamungkas (2012). Kemudian Mandasari (2015) menyebutkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan didukung oleh penelitian Fariana (2018).

### **2.2.3 Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

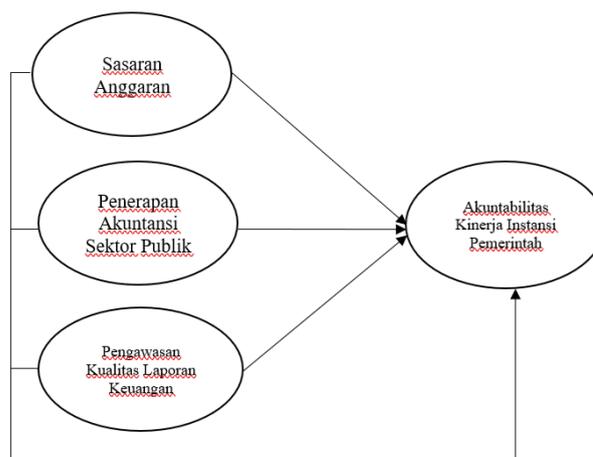
Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas publik. Dalam teori agensi disebutkan bahwa pihak manajerial sering memiliki informasi yang lebih dari pihak investor, sehingga sering menimbulkan asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Akuntansi sektor publik berperan untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai salah satu

bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Ridzal, 2020; Pamungkas, 2012)

#### **2.2.4 Pengaruh Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Adapun pengaruh sasaran anggaran, penerapan standar akuntansi keuangan sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan perumusan masalah yang di kemukakan di atas hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut.
2. Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut.
3. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut.
4. Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Adapun variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah sasaran anggaran, penerapan standar akuntansi sektor public dan pengawasan kualitas laporan keuangan.

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2018) Definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat di ukur. Dalam penelitian ini definisi operasional yang diukur ada dua variabel, yaitu Sasaran Anggaran ( $X_1$ ), Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik ( $X_2$ ), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan ( $X_3$ ), dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( $Y$ ) sebagai variabel terikat. Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Variabel Independen

Variabel bebas (*independen variabel*) merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (terikat). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sasaran Anggaran ( $X_1$ ), Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik ( $X_2$ ), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan ( $X_3$ )

##### 2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi daya tarik atau

fokus penelitian, variabel ini juga dikenal sebagai variabel terikat Chandrarin (2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum</li> <li>2. Akuntabilitas Kebijakan</li> <li>3. Akuntabilitas Proses</li> <li>4. Akuntabilitas Program</li> </ol>	<i>Ordinal</i>
2	Sasaran Anggaran (X <sub>1</sub> )	Sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spesifik</li> <li>2. Mengerti</li> <li>3. Jelas</li> </ol>	<i>Ordinal</i>

3	Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X <sub>2</sub> )	Alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Publik</li> <li>2. Penganggaran Publik</li> <li>3. Realisasi Anggaran Publik</li> <li>4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik</li> <li>5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik</li> <li>6. Audit Sektor Publik</li> <li>7. Pertanggungjawaban Publik</li> </ol>	<i>Ordinal</i>
4	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X <sub>3</sub> )	Laporan terorganisir yang merinci situasi dan transaksi keuangan entitas pelapor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevan</li> <li>2. Keandalan keandalan Informasi harus andal (reliable),</li> <li>3. Dapat Dibandingkan</li> <li>4. Dapat dipahami</li> </ol>	<i>Ordinal</i>

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September 2023 sampai dengan selesai.

**Tabel 3.2**  
**Jadwal Penelitian**

No	Proses Penelitian	Bulan											
		September 2023				Oktober 2023				November 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data Awal												
2	Pengajuan Judul Penelitian												
3	Pengumpulan Teori Penelitian												
	Bimbingan												

4	Penyusunan Proposal											
5	Bimbingan Dan proses Revisi											
6	Seminar Proposal Manajemen											
7	Mengelola Data											
8	Menganalisis Data											
9	Penyusunan Skripsi											
10	Sidang Meja Hijau											

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

#### a. Populasi

Menurut (Siregar, 2017) Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil yang menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin mempelajari sifat-sifatnya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan pada setiap UPT ruang lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut sebanyak 57 staf pegawai bagian keuangan.

#### b. Sampel

Menurut(Sanjaya, 2013) Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh dimana semua populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 57 pegawai bagian keuangan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Sampel Penelitian**

<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah</b>
Bag. Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara	22
Bag. Keuangan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	8
Bag. Keuangan UPT Budaya Ikan Air Payau dan Laut Provinsi Sumatera Utara	16
Bag. Keuangan UPT Perikanan Pantai Pulau Telo	6
Bag. Keuangan UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan	5
Jumlah	57

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah:

#### **3.5.1 Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi (orang yang diwawancarai) melalui komunikasi langsung.

#### **3.5.2 Teknik Angket (Qoesioner)**

Quesioner adalah pertanyaan/penyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat atau persepsi responden penelitian tentang suatu variable yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang di tunjukkan kepada karyawan di objek penelitian yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut dengan menggunakan skala likert. Selanjutnya Angket atau Kuesioner yang telah di susun akan di uji kelayakan melalui pengujian validaitas dan reliabilitas.

### 3.6 Uji Instrumen Penelitian

#### 1. Uji Instrumen Penelitian

##### a. Uji Validitas

Menguji validitas bertujuan untuk menguji sejauhmana ketetapan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumenvalid/benar maka hasil pengukuran kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2015).

Kriteria pengujian validitas instrument sebagai berikut:

- 1) Tolak  $H_0$  atau terima  $H_a$  jika nilai korelasi adalah positif dan probabilitas yang dihitung  $<$  nilai probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 (sig 2-tailed  $< \alpha 0,05$ ), maka butir instrument valid.
- 2) Terima  $H_0$  atau tolak  $H_a$  jika nilai korelasi adalah negatif dan probabilitas yang dihitung  $>$  nilai probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 (Sig 2- tailed  $> \alpha 0,05$ ), maka butir instrument tidak valid. (Juliandi et al., 2018, hal. 19-20).

Untuk hasil uji validitas pada variabel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r tabel	r hitung	Ket
Sasaran Anggaran (X <sub>1</sub> )	X1.1	0,3494	0,705	Valid
	X1.2	0,3494	0,724	Valid
	X1.3	0,3494	0,534	Valid
Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X <sub>2</sub> )	X2.1	0,3494	0,895	Valid
	X2.2	0,3494	0,881	Valid
	X2.3	0,3494	0,628	Valid
	X2.4	0,3494	0,613	Valid
	X2.5	0,3494	0,712	Valid

	X2.6	0,3494	0,895	Valid
	X2.7	0,3494	0,881	Valid
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X <sub>3</sub> )	X3.1	0,3494	0,673	Valid
	X3.2	0,3494	0,480	Valid
	X3.3	0,3494	0,750	Valid
	X3.4	0,3494	0,646	Valid
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	Y.1	0,3494	0,592	Valid
	Y.2	0,3494	0,780	Valid
	Y.3	0,3494	0,685	Valid
	Y.4	0,3494	0,680	Valid

Berdasarkan Tabel 3.4 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel penelitian ini memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga pernyataan pada seluruh variabel penelitian dinyatakan valid.

#### **b. Uji Realibilitas**

Pengujian Reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memilih tingkat keterpercayaan yang tinggi (Juliandi et al., 2014). Teknik yang dipakai untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha* Arikunto dalam (Juliandi et al., 2014)

Untuk pengujian reabilitas peneliti menggunakan SPSS dengan rumus scale. Reabilitas analisis dengan menggunakan bukti skor pernyataan dan totalnya pada setiap variabel.

Kriteria pengujian menurut nunali dalam (Juliandi et al., 2014) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai koefisien reliabilitas  $\geq 0,6$  maka instrument memiliki reabilitas yang baik.

- 2) Jika nilai koefisien reabilitas  $\leq 0,6$  maka instrument memiliki reabilitas yang kurang baik.

**Tabel 3.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Item Pernyataan	Cronbach Alpha	Cronbach Alpha	Ket
Sasaran Anggaran (X <sub>1</sub> )	3	0,6	0,652	Reliabel
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X <sub>2</sub> )	7	0,6	0,857	Reliabel
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X <sub>3</sub> )	4	0,6	0,640	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	4	0,6	0,624	Reliabel

Berdasarkan Tabel 3.6 maka dapat diketahui bahwa reliabilitas instrument pada penelitian ini masing-masing lebih besar dari 0,6 maka data bisa dikatakan reliabel.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis Data Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya dan dideskripsikan secara deduksi yang berangkat dari teori-teori umum, lalu dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut ditariklah kesimpulan. Kemudian di jabarkan secara deskriptif, karena hasilnya akan darahkan untuk mendiskripsikan data yang diperoleh dan untuk menjawab

rumusan.

## 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Ghozali, 2016) analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Untuk keperluan analisis, variabel bebas akan dinyatakan dengan X sedangkan variabel terikat dinyatakan dengan Y. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan ;

Y = Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Sasaran Anggaran

X<sub>2</sub> = Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik

X<sub>3</sub> = Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

$\epsilon_1$  = Error

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah pengujian terhadap model regresi untuk mengindari adanya penyimpangan pada model regresi dan untuk mendapatkan model regresi yang lebih akurat. Pengujian asumsi klasik

terdiri dari empat pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dalam mengolah data penulis dibantu dengan *Software SPSS 23.0 for Windows*.

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal dengan tingkat signifikan atau p-value lebih besar dari  $\alpha$  yaitu 0,05 atau dapat dilihat dari normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal (Ghozali, 2016).

**b. Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan dari pengujian heteroskedastisitas ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Diukur dengan Rank Spearman dimana koefisien regresi berganda dari nilai t-tolerance  $> 5$  sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

**c. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi di temukan adanya korelasi antara variabel bebas. Teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan variance inflation factor (VIF), apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak multikolonieritas diantara variabel bebasnya (Ghozali, 2016).

### 3. Uji Hipotesis

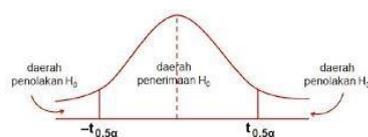
#### a. Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu turnover intention. Cara mendeteksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan melihat tabel coefficients dapat dilihat dari koefisien regresi dan hubungan antara variabel tersebut. Jika tanda (-) maka variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen dan jika tidak ada tanda (-) maka variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan pada kolom “sig” adalah untuk melihat signifikansinya. Jika nilainya kurang dari  $\alpha = 5\%$  (0,05) maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilainya kurang dari  $\alpha = 10\%$  (0,10) maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh sangat signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis di atas akan diuji berdasarkan daerah penerimaan dan daerah penolakan yang ditetapkan sebagai berikut:

- $H_0$  akan diterima jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05
- $H_0$  akan ditolak jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05

Atau dengan cara lain sebagai berikut:

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima
- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak



**Gambar 3.1**  
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

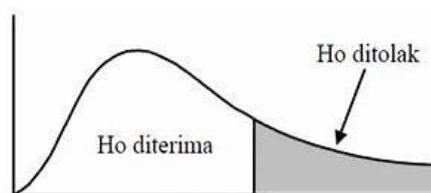
### b. Uji F

Menurut Ghozali (2018:98), Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

Uji F dilakukan untuk melakukan uji terhadap hipotesis, maka harus ada kriteria pengujian yang ditetapkan. Kriteria pengujian ditetapkan dengan membandingkan nilai  $t$  atau  $F_{hitung}$  dengan  $t$  atau  $F_{tabel}$  dengan menggunakan tabel harga kritis  $t_{tabel}$  dan  $F_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan tadi sebesar 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ). Pada pengujian secara simultan akan diuji pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Apabila dalam penelitian ini probabilitas sebesar 5% yaitu  $\alpha > 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Kemudian  $\alpha < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

Apabila dalam penelitian ini probabilitas sebesar 5% yaitu  $\alpha > 0,05$  variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian  $\alpha < 0,05$ , maka variabel independen berpengaruh terhadap dependen.



**Gambar 3.2**

### **Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F**

#### **4. Koefisien Determinasi**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut**

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terbentuk pada tahun 2001 berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2001. Berikut ini adalah beberapa pimpinan DKP Sumut dari masa ke masa:

- Drs. H. Ridwan Batubara MM (2001-2006)
- IR. Yosep Siswanto (2006-2009)
- H. OK Zulkarnain, SH, M.Si (2009-2014)
- H. Zonny Waldi S.Sos MM (sejak 15 Agustus 2014 sampai dengan sekarang)

DKP Sumut berkedudukan di Jalan Sei Batu Gingging No. 6 Medan Kel, Medan Selayang Kec, Medan Baru Kota Medan.

Tugas pokok DKP adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

##### **4.1.2 Deskripsi Data Responden Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 3 pernyataan untuk variabel sasaran anggaran (X1), 7 pernyataan untuk variabel penerapan standar akuntansi sektor publik (X2), 4 pernyataan untuk variabel pengawasan laporan kualitas keuangan (X3), dan 4 pernyataan untuk variabel akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah (Y). Angket yang disebar ini diberikan kepada 57 responden karyawan bagian keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut. Berikut deskripsi responden

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut:

### 1. Karakteristik Responden berdasarkan Usia

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	(%)
20 – 30 tahun	10	17,5%
31 – 40 tahun	28	49,2%
➤ 40 tahun	19	33,3%
Total	57	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa mayoritas pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut adalah pegawai yang berusia diantara 31 sampai 40 tahun sebanyak 28 pegawai atau 49,2% dari keseluruhan pegawai. Hal ini dikarenakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut posisi pekerjaannya lebih membutuhkan pegawai yang berusia dewasa dan produktif, sehingga lebih banyak ditemukan pegawai yang berusia diantara 31-40 tahun.

### 2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	(%)
Laki-Laki	22	38,5%
Perempuan	35	61,5%
Total	57	100%

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa mayoritas pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut adalah pegawai yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 35 pegawai atau sebesar 61,5% dari keseluruhan pegawai. Hal ini dikarenakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut pada saat seleksi penerimaan pegawai selalu didominasi pegawai perempuan.

### 4.1.3 Deskripsi Data Variabel Penelitian

#### 1. Deskripsi Data Variabel Sasaran Anggaran (X<sub>1</sub>)

**Tabel 4.3**  
**Deskripsi Data Variabel Sasaran Anggaran**

Pernyataan	SS		S		CS		TS		STS		Skor Rata-Rata Jawaban	Kategori
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Pada instansi tempat Saya bekerja, kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefiniskan dengan jelas dan komprehensif.	23	40,4%	26	45,6%	7	12,3%	1	1,8%	0	0%	4,24	Baik
Pada instansi tempat Saya bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas dan spesifik	24	42,1%	26	45,6%	6	10,5%	1	1,8%	0	0%	4,28	Baik
Pada instansi tempat Saya bekerja, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran (RBA).	28	49,1%	26	45,6%	3	5,3%	0	0%	0	0%	4,43	Baik
Rata-Rata											4,3 <sup>^</sup>	Baik

Berdasarkan Tabel 4.3 Sasaran Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut rata-rata skor jawaban responden bernilai rata-rata 4,31 (baik). Adapun masing-masing pernyataan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada pernyataan “Pada instansi tempat Saya bekerja, kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefiniskan dengan jelas dan komprehensi” mayoritas responden menjawab setuju sebesar 45,6% atau sebanyak 26

pegawai.

2. Pada pernyataan “Pada instansi tempat Saya bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas dan spesifik” mayoritas responden menjawab setuju sebesar 45,6% atau sebanyak 26 pegawai.
3. Pada pernyataan “Pada instansi tempat Saya bekerja, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran (RBA).” mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 49,1% atau sebanyak 28 pegawai.

## 2. Deskripsi Data Variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X<sub>2</sub>)

**Tabel 4.4**  
**Deskripsi Data Variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik**

Pernyataan	SS		S		CS		TS		STS		Skor Rata-Rata Jawaban	Kategori
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.	28	49,1%	25	43,9%	4	7%	0	0%	0	0%	4,42	Baik
Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas.	24	42,1%	26	45,6%	3	5,3%	0	0%	0	0%	4,33	Baik
Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal, dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan.	29	50,9%	24	42,1%	4	7%	0	0%	0	0%	4,43	Baik
Pelaporan informasi keuangan dapat	32	56,1%	24	42,1%	1	1,8%	0	0%	0	0%	4,54	Baik

dipahami dengan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.													
Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya.	24	42,1%	26	45,6%	6	10,5%	1	1,8%	0	0%	4,28	Baik	
Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur - unsur laporan keuangan.	28	49,1%	25	43,9%	4	7%	0	0%	0	0%	4,21	Baik	
Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik.	22	38,6%	33	57,9%	1	1,8%	1	1,8%	0	0%	4,33	Baik	
Rata-Rata											4,36	Baik	

Berdasarkan Tabel 4.4 Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut rata-rata skor jawaban responden bernilai rata-rata 4,36 (baik).

Adapun masing-masing pernyataan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada pernyataan “Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya” mayoritas responden menjawab setuju sebesar 49,1% atau sebanyak 28 pegawai.
2. Pada pernyataan “Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas” mayoritas responden menjawab setuju sebesar 45,6% atau sebanyak 26 pegawai.
3. Pada pernyataan “Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.” mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 50,9% atau sebanyak 26 pegawai.
4. Pada pernyataan “Pada instansi tempat Saya bekerja, rencana kerja dan anggaran telah terdefinisikan dengan jelas dan komprehensi” mayoritas responden menjawab setuju sebesar 45,6% atau sebanyak 29 pegawai.
5. Pada pernyataan “Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya” mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 56,1% atau sebanyak 32 pegawai.
6. Pada pernyataan “Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur - unsur laporan keuangan.” mayoritas responden menjawab

sangat setuju sebesar 49,1% atau sebanyak 28 pegawai.

7. Pada pernyataan “Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik” mayoritas responden menjawab setuju sebesar 57,9% atau sebanyak 33 pegawai.

### 3. Deskripsi Data Variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

(X<sub>3</sub>)

**Tabel 4.5**  
**Deskripsi Data Variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan**

Pernyataan	SS		S		CS		TS		STS		Skor Rata-Rata Jawaban	Kategori
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu.	29	50,9%	24	42,1%	4	7%	0	0%	0	0%	4,43	Baik
Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang	32	56,1%	24	42,1%	1	1,8%	0	0%	0	0%	4,54	Baik
Penyajian/ penerbitan laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi.	31	54,4%	24	42,1%	2	3,5%	0	0%	0	0%	4,50	Baik
Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap	22	38,6%	26	45,6%	7	12,3%	2	3,5%	0	0%	4,15	Baik

mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan													
Rata-Rata											4,40	Baik	

Berdasarkan Tabel 4.5 Kualitas Pengawasan Laporan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut rata-rata skor jawaban responden bernilai rata-rata 4,40 (baik).

Adapun masing-masing pernyataan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada pernyataan “Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu.” mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 50,9% atau sebanyak 29 pegawai.
2. Pada pernyataan “Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang” mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 56,1% atau sebanyak 32 pegawai.
3. Pada pernyataan “Penyajian/ penerbitan laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi” mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 54,4% atau sebanyak 31 pegawai.
4. Pada pernyataan “Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan” mayoritas responden menjawab setuju sebesar 45,6% atau sebanyak 26 pegawai.

#### 4. Deskripsi Data Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Y)

**Tabel 4.6**  
**Deskripsi Data Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pernyataan	SS		S		CS		TS		STS		Skor Rata-Rata Jawaban
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Pada instansi tempat Saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin	27	47,4%	28	49,1%	2	3,5%	0	0%	0	0%	4,43
Visi dan misi program instansi tempat saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.	28	49,1%	24	42,1%	5	8,8%	0	0%	0	0%	4,30
Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.	21	36,8%	33	57,9%	3	5,3%	0	0%	0	0%	4,41
Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan	33	57,9%	21	36,8%	3	5,3%	0	0%	0	0%	4,52
Rata-Rata											4,41

Berdasarkan Tabel 4.6 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut rata-rata skor jawaban responden bernilai rata-rata 4,31 (baik).

Adapun masing-masing pernyataan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada pernyataan “Pada instansi tempat Saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin” mayoritas responden menjawab setuju sebesar 49,1% atau sebanyak 28 pegawai.
2. Pada pernyataan “Visi dan misi program instansi tempat Saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi” mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 49,1% atau sebanyak 28 pegawai.
3. Pada pernyataan “Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.” mayoritas responden menjawab setuju sebesar 57,9% atau sebanyak 33 pegawai.
4. Pada pernyataan “Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan” mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 57,9% atau sebanyak 33 pegawai.

#### **4.1.4 Analisis Data**

##### **4.1.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.533	1.964		3.835	.000		
	X1	.340	.147	.324	2.310	.025	.612	1.633
	X2	.083	.082	.170	1.006	.019	.424	2.361
	X3	.470	.137	.511	3.430	.001	.544	1.839

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 7,533 + 0,340X_1 + 0,083X_2 + 0,740X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. Variabel sasaran anggaran, penerapan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan mempunyai arah koefisien yang bertanda positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Koefisien sasaran anggaran memberikan nilai sebesar 0,340 yang berarti bahwa meningkatnya sasaran anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Koefisien penerapan standar akuntansi sektor publik memberikan nilai sebesar 0,083 yang berarti bahwa meningkatnya penerapan standar akuntansi sektor publik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- d. Koefisien pengawasan kualitas laporan keuangan memberikan nilai sebesar 0,740 yang berarti bahwa meningkatnya pengawasan kualitas

laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **4.1.4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal. Jika asumsi klasik terpenuhi maka akan menghasilkan estimator yang sesuai *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), yang artinya model regresi dapat digunakan sebagai alat estimasi penelitian (Ghozali, 2016).

##### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Uji ini dapat dilihat dengan membandingkan  $Z$  hitung dengan  $Z$  tabel, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika  $Z$  hitung (*Kolmogorov Smirnov*)  $< Z$  tabel (1,96), atau angka signifikan  $>$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05; maka distribusi data dikatakan normal.
- b) Jika  $Z$  hitung (*Kolmogorov Smirnov*)  $> Z$  tabel (1,96), atau angka signifikan  $<$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 distribusi data dikatakan tidak normal.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.14181999
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.076
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

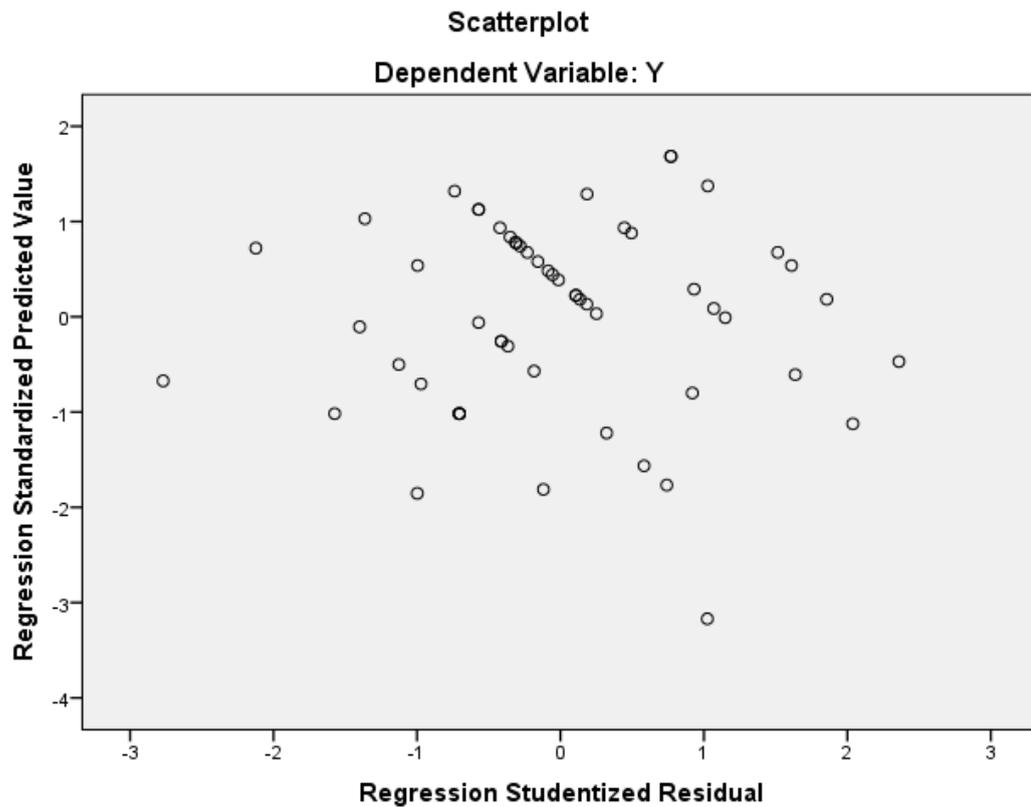
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji statistik *kolmogorov-smirnov* dapat diketahui bahwa data variabel penelitian berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikan sebesar  $0,200 > 0,05$  maka residual berdistribusi normal.

## 2. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot*.



Sumber: data diolah 2024

**Gambar 4.1 Hasil Grafik *Scatterplot***

Dari grafik *scatterplot* setelah transformasi data gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik telah menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y yang artinya model regresi tidak lagi mengalami masalah heterokedastisitas.

### 3. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016), multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Berikut hasil dari uji multikolinearitas sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.533	1.964		3.835	.000		
	X1	.340	.147	.324	2.310	.025	.612	1.633
	X2	-.083	.082	-.170	-1.006	.319	.424	2.361
	X3	.470	.137	.511	3.430	.001	.544	1.839

a. Dependent Variable: Y  
Sumber: data diolah 2024

Pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel penelitian lebih kecil dari 10. Adapun nilai *tolerance* variabel penelitian lebih besar dari 0,1. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson (DW test)*. Berikut ini disajikan hasil pengujian autokorelasi dengan metode *Durbin-Watson (DW)*.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.601 <sup>a</sup>	.361	.325	1.17369	2.092

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolahpeneliti, 2024

Berdasarkan pada tabel 4.10 di atas hasil uji autokorelasi setelah transformasi menunjukkan bahwa nilai  $du < DW < 4-du$  atau  $0.7529 < 2,092 < 2.247$ , artinya model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

#### 4.1.4.3 Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis ialah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol).

##### a. Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah atau parsial. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis secara parsial:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.533	1.964		3.835	.000		
	X1	.340	.147	.324	2.310	.025	.612	1.633
	X2	.083	.082	.170	1.006	.019	.424	2.361
	X3	.470	.137	.511	3.430	.001	.544	1.839

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai signifikansi Sasaran Anggaran sebesar  $0,025 < 0,05$  menunjukkan bahwa Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka,  $H_1$  dapat diterima.
2. Nilai signifikansi Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik sebesar  $0,019 < 0,05$  menunjukkan bahwa Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Sektor maka,  $H_2$  dapat diterima.
3. Nilai signifikansi Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan sebesar  $0,001 < 0,05$  menunjukkan bahwa Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka,  $H_3$  dapat diterima.

#### **b) Uji F**

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variable independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh terhadap variable dependen. Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance* level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak fit. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa model regresi fit.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41.306	3	13.769	9.995	.000 <sup>b</sup>
	Residual	73.010	53	1.378		
	Total	114.316	56			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.12 di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai signifikansi menunjukkan  $< 0,05$ , artinya bahwa model ini layak untuk digunakan pada penelitian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

#### 4.1.4.4 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk menguji kemampuan model regresi variabel penelitian. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.601 <sup>a</sup>	.361	.325	1.17369	2.092

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah, 2024

Menurut Ghazali (2016), peneliti dianjurkan untuk menggunakan nilai  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik karena R dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, nilai  $R^2$  adalah 0,361. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen adalah sebesar 36,1%, sedangkan sisanya sebesar 63,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pengaruh Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,025 < 0,05$  sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (2018) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan penelitian Karismawati Agustin (2018) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan penelitian Reyhan Hadi Fauzan (2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sasaran Anggaran yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sudah dijalankan dengan baik dan searah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena untuk meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintahan perlu adanya Sasaran Anggaran agar dapat mencapai tujuan-tujuan pelaksanaan tugas dari organisasi tersebut.

#### **4.3.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,019 < 0,05$  sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa penerapan standar akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandasari (2015) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal ini disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan akuntansi sektor publik pada suatu instansi pemerintah, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Kenaikan kualitas LKPD tersebut dikarenakan pemerintah daerah mendorong OPD di setiap instansi guna melakukan perbaikan diantaranya melakukan inventarisasi, serta melakukan pengembalian dana atas ketekoran kas dan kelebihan pembayaran belanja modal dan belanja barang dan jasa. Tentunya menjadi suatu keberhasilan dan kebanggaan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengelola keuangan dan asset daerah secara transparan dan akuntabel

#### **4.3.3 Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridzal (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Keluatan dan Perikanan Provsu, maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Keluatan dan Perikanan Provsu. Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, social dan politik. Suatu instansi pemerintah sudah pasti diawasi oleh pihak internal dan eksternal dalam setiap proses pencapaiannya, namun sistem pengawasan internal instansi pun mutlak menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa Sasaran Anggaran dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.
2. Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.
3. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.
4. Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan dapat meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, berikut saran yang dapat peneliti berikan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:

1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu agar lebih meningkatkan lagi kinerja dalam bekerja sehingga tujuan dari instansi tersebut dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, B. R. (2016). Pengaruh Independensi Auditor, Profesionalisme Auditor, Etika Profesi Auditor, Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya. Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya. Universitas Airlangga Surabaya
- Asmawanti, D., Sari, A. mayang, Fitranita, V., & Oktari, I. W. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal f Applied Accounting And Tax*, 5(1), 85±94. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAAT/article/view/1850>
- Bastian, Indra. (2014). Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Cetakan 1, Jakarta: Salemba Empat
- Biduri, Sarwenda. (2018). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- BPKP. 2007, Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Dwiyanto, Agus. 2017. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaborati. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Hasanah, Nurmalia dan Achmad Fauzi.2017. Akuntansi Pemerintah.Bogor: In Media.
- Juliandi, Azuar., Irfan dan Saprinan Manurung. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Medan: UMSU Press.
- Marbun, Tatian Sartika., Sari, Eka Nurmala dan Irfan, Irfan. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Humaniora*. Vol. 8., No.1
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua. Jakarta:Salemba Empat
- Pamungkas, Bambang. (2012) Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*. Volume 12 No 2, Oktober 2012: 82-93
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Jurnal Inovasi Bisnis* 7, 147-153.
- Sirait, Rudi Junjungan., Sari, Eka Nurmala dan Astuty, Widia. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 8., No. 2.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta,Bandung
- Tarigan, Joppie Immanuel dan Sari, Eka Nurmala. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Universitas Islam Bandung*. Vol. 22., No. 2

- Toman, Sony Tambunan. 2016. Grosarium Istilah Pemerintahan. Edisi Pertama. Jakarta:KENCANA.
- Toto Prihadi. 2013. Analisis Laporan Keuangan Teori dan Aplikasi. Jakarta: PPM

## Lampiran 1. Kuesioner

**PENGARUH SASARAN ANGGARAN, PENERAPAN STANDAR  
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH PADA DINAS  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
SUMUT**

## A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : ..... (boleh tidak diisi)

Usia : ..... tahun

Jenis Kelamin : ( ) Pria ( ) Wanita

## B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Beri jawaban atas pernyataan berikut ini sesuai dengan pendapat anda.

2. Keterangan dari singkatan jawaban adalah:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

3. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bapak/Ibu cukup menjawab sesuai yang bapak/ibu alami dan rasakan dalam menjalankan tugasnya. Jawaban bapak/ibu dijamin kerahasiannya. Harap mengisi semua pernyataan. Selamat mengisi kuesioner.

**1. Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah**

No	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Pada instansi tempat saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin					
2	Visi dan misi program instansi tempat Saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					

3	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.					
4	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan					

## 2. Sasaran Anggaran

No	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Pada instansi tempat Saya bekerja, kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefiniskan dengan jelas dan komprehensif.					
2	Pada instansi tempat Saya bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas dan spesifik					
3	Pada instansi tempat Saya bekerja, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran (RBA).					

## 3. Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik

No	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.					
2	Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas.					
3	Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal, 128 dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan.					
4	Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.					

5	Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya.					
6	Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur - unsur laporan keuangan.					
7	Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik.					

#### 4. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

No	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu.					
2	Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang					
3	Penyajian/ penerbitan laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi.					
4	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan					

## Lampiran 2. Data Tabulasi Responden

X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	X1	X2	X3	Y
4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	13	30	20	20
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	28	16	16
4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	11	26	16	17
5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	14	34	19	18
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	28	16	16
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	12	28	16	15
5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	3	4	4	4	5	14	34	17	17
5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	14	30	18	20
4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	14	29	17	18
4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	14	29	17	18
5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	14	29	18	18
2	3	4	3	2	3	5	3	3	2	3	5	4	1	3	5	4	4	9	21	13	16
4	5	3	5	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	5	3	3	4	12	31	15	15
5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	3	4	4	4	5	14	34	17	17
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	35	20	20
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	12	28	15	17
5	2	4	3	4	5	5	2	3	4	5	5	4	1	4	4	4	5	11	26	15	17
3	3	5	4	4	5	5	3	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	11	29	19	18
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	12	28	16	16
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	35	20	20
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	12	28	16	16
4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	13	32	18	19
4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	13	33	19	20
4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	3	13	34	18	16
3	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	13	31	18	20
4	4	4	3	4	4	5	4	3	4	4	5	5	5	5	4	4	3	12	27	19	16
4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	14	31	17	18
4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	13	31	18	18
4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	14	33	19	19
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	14	35	19	18
3	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	12	32	18	17

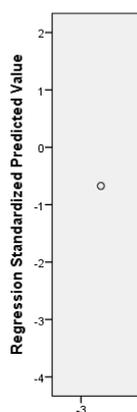
5	4	4	4	5	3	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	3	5	13	29	14	16
5	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	12	34	18	16
3	3	5	4	3	4	5	3	4	3	4	5	5	3	4	3	3	4	11	26	17	14
4	3	4	5	5	4	5	3	5	5	4	5	4	5	3	4	4	5	11	32	18	16
4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	13	34	19	18
3	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	11	31	18	19
5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	14	32	19	17
4	3	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	4	5	5	4	11	33	18	18
4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	14	33	19	18
4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	3	14	32	18	18
3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	12	28	17	20
3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	5	5	5	4	11	25	16	19
5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	15	33	18	18
4	4	3	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	11	31	19	17
5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	3	5	5	4	4	14	31	18	18
5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	13	33	19	17
5	5	5	5	4	3	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	5	15	30	15	17
5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	14	34	18	19
4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	14	30	18	18
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	14	35	20	19
5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	13	33	18	19
5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	14	29	19	18
5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	14	31	19	18
5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	14	31	19	18
5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	15	32	18	19
5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	14	33	18	18

## Lampiran 3. Hasil Output SPSS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.533	1.964		3.835	.000		
	X1	.340	.147	.324	2.310	.025	.612	1.633
	X2	.083	.082	.170	1.006	.019	.424	2.361
	X3	.470	.137	.511	3.430	.001	.544	1.839

a. Dependent Variable: Y

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.14181999
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.076
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.601 <sup>a</sup>	.361	.325	1.17369	2.092

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41.306	3	13.769	9.995	.000 <sup>b</sup>
	Residual	73.010	53	1.378		
	Total	114.316	56			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

